

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan pertanian dan peternakan Kabupaten Berau, sebagai penjabaran dari arah dan kebijakan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021 Kabupaten Berau serta mengacu pada pembangunan Provinsi Kalimantan Timur bidang pertanian dan peternakan.

Pembangunan pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stake holders*) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun pendek (RKPD) dan dikuatkan

dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya dengan berpedoman dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Berau, arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing instansi dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi untuk jangka waktu lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai penjabaran yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Kebijakan lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Berau.

Agenda utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil guna menghasilkan nilai tambah produk pertanian dan peternakan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

Secara nasional pembangunan peternakan pada dasarnya adalah mengemban misi untuk dapat menyediakan pangan asal ternak baik kualitas maupun kuantitasnya, karena seperti diketahui protein hewani yang didapatkan pada produk-produk peternakan sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia. Peran ternak sebagai sumber pangan hewani masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pemenuhan protein dimaksud.

Rencana Strategis Pertanian dan Peternakan secara spesifik akan memuat indikasi program dan Kegiatan bidang-bidang yang menjadi kompetensi organisasi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Berau. Adanya penetapan

rencana ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat untuk bidang Pertanian dan Peternakan dapat lebih terarah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindakan.

Rencana Strategis (Renstra) disusun guna menjamin keberlanjutan dan konsistensi program pembangunan pertanian tanaman pangan sekaligus menjaga fokus pencapaian sasaran periode 5 (lima) tahun ke depan, yang dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2016 -2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 7 ayat 1);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2015;
6. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau 2006-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau 2016-2020.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
20. Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;

Selain merujuk seluruh produk hukum diatas, Renstra ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Provinsi dan Instansi sektoral pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan perubahan keadaan.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan dan pemilihan program/kegiatan selama kurun waktu 2016-2021 selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sistematika Penulisan

Perencanaan strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya yang diharapkan menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau merancang rencana strategis secara bersama-sama dengan segenap jajarannya untuk

diimplementasikan bersama dalam rangka pencapaian tujuan. Perumusan rencana strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik – kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Penyajian rencana strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau terdiri dari delapan bab yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis perangkat daerah, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Menguraikan tentang tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, kinerja perangkat daerah pada periode Renstra yang lalu, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan

Mengungkapkan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan isu strategis Dinas Pertanian dan Peternakan dalam mengemban tugas dan fungsi

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan yang akan diwujudkan selama periode Renstra.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pertanian dan Peternakan.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai lima tahun kedepan dan Rincian Rencana Anggaran yang dibutuhkan.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 maupun indikator kinerja lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bab VIII. Penutup

Memuat kesimpulan dan kaidah-kaidah yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****Tugas Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Dan Peternakan
Kabupaten Berau*****Tugas Pokok dan Fungsi***

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok, yaitu :

“Menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pertanian dan Peternakan serta tugas- tugas pembantuan“

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

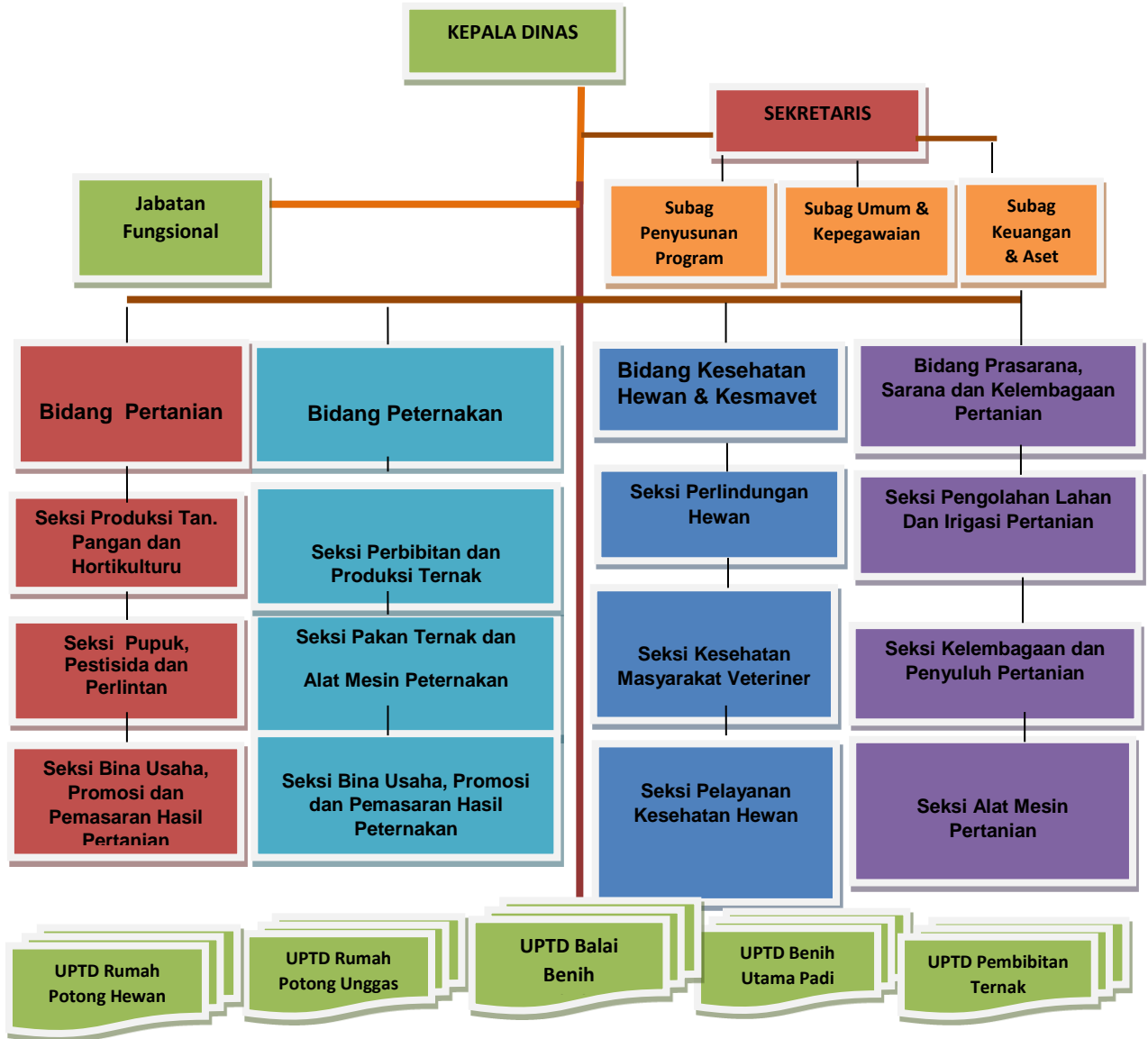
- a. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanian dan Peternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pertanian dan Peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan Peternakan;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan UPTD;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten

Berau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau



Penjabaran struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan Perbup Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat;** terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3. Bidang Pertanian;** terdiri dari 3 (tiga) Seksi, antara lain:
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Perlindungan Tanaman
 - c. Seksi Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian
- 4. Bidang Peternakan;** terdiri dari 3 (tiga) Seksi, antara lain:
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
 - b. Seksi Pakan Ternak dan Alat Mesin Peternakan
 - c. Seksi Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Peternakan
- 5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;** terdiri dari 3 (tiga) Seksi, antara lain:
 - a. Seksi Perlindungan Hewan
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
- 6. Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Pertanian;** terdiri dari 3 (tiga) Seksi, antara lain:
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian
 - b. Seksi Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian
 - c. Seksi Alat Mesin Pertanian
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);**
 - a. BBU Padi (Lokasi Kampung Sei Bebanir Bangun)
 - b. Balai Bibit Hortikultura (Lokasi Kelurahan Gunung Tabur)
 - c. Rumah Potong Hewan (RPH) (Lokasi Kelurahan Gunung Tabur)
 - d. Rumah Potong Unggas (RPU) (Lokasi Kelurahan Gunung Tabur)
 - e. Pembibitan Ternak (Lokasi Kampung Labanan Jaya)

Sumber Daya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang dirinci berdasarkan tingkat golongan ruang yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel I

Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian

No.	Golongan	Ruang				Status Kepegawaian		Jumlah
		a	b	c	d	CPNS	PNS	
1	Golongan I	1	-	1	-	-	2	2
2	Golongan II	4	3	12	4	-	23	23
3	Golongan III	7	6	15	16	-	44	44
4	Golongan IV	4	1	1	-	-	6	6
5	Non PNS						-	25
Total						-	75	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 100 orang SDM yang terdiri dari 6 (enam) orang aparatur golongan IV, 44 (empat puluh empat) orang aparatur golongan III, 23 (dua puluh tiga) orang aparatur golongan II dan 2 (dua) orang aparatur golongan I, serta non PNS sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS	T o t a l
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	2	-	-	2
2	SLTP	-	-	2	2
3	SLTA	22	5	14	41
4	Diploma	2	-	-	2
5	SI	27	12	9	48
6	S2	4	1	-	5
Jumlah		57	18	25	100

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur yang berstatus PNS dan Non PNS pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan bahwa didominasi oleh tingkat pendidikan SI dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) orang atau 48%, selanjutnya SLTA jumlah 41 (empat puluh satu) atau 41%, S2 jumlah 5 orang atau 5%, dan SD, SLTP, Diploma dengan jumlah sama 2 orang atau 2%.

Sedangkan sumber daya aparatur pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau berdasarkan tingkat eselon (jabatan struktural) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Tersedia	Terisi	Lowong	
1	Eselon II.B	1	1	-	
2	Eselon III.A	1	1	-	
3	Eselon III.B	4	4	-	
4	Eselon IV.A	20	19	1	1 orang pensiun
5	Eselon IV.B	12	4	8	kosong
Jumlah		31	29	2	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal terkait dengan jumlah jabatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Eselon II.B adalah eselon untuk jabatan Kepala Dinas, jabatan tersebut telah terisi definitif.
2. Eselon III.A adalah eselon untuk jabatan Sekretaris Dinas, dan jabatan tersebut telah terisi definitif.
3. Eselon III.B, adalah eselon untuk jabatan Kepala Bidang pada Dinas, sebanyak 4 (empat) dan telah terisi definitif.
4. Eselon IV.A adalah eselon untuk jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD.
5. Eselon IV.B adalah eselon untuk jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.

Sumber daya aparatur pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yang telah mengisi jabatan struktural apabila dikaitkan dengan latar belakang pendidikan serta kepangkatan dari masing-masing pejabat struktural sebagai berikut ini:

Tabel 4
Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Latar Belakang Pendidikan Pejabat Struktural

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Dinas	S1	S1	IV/c	IV/b	
2	Sekretaris	S1	S1	IV/b	IV/a	
3	Kabid Pertanian	S1	S1	III/d	III/d	
4	Kabid Peternakan	S1	S1	IV/a	III/d	
5	Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmavet	S1	S1	IV/a	III/d	
6	Kabid Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Pertanian	S1	S1	IV/a	III/d	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1	S1	III/d	III/b	
8	Kasubbag Keuangan dan Aset	S1	S1	III/c	III/b	
9	Kasubbag Penyusunan Program	S1	S1	III/d	III/b	
10	Kasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	S1	S1	III/d	III/b	
11	Kasi Pupuk, Pestisida dan Perlindungan Tanaman	S2	S1	III/d	III/b	
12	Kasi Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian	-	S1	-	III/b	lowong
13	Kasi Perbibitan dan Produksi Ternak	S1	S1	III/d	III/b	
14	Kasi Pakan Ternak dan Alat Mesin Peternakan	S1	S1	III/d	III/b	
15	Kasi Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Peternakan	S1	S1	III/d	III/b	
16	Kasi Perlindungan Hewan	S1	S1	III/d	III/b	
17	Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	S1	S1	III/d	III/b	
18	Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan	S1	S1	III/d	III/b	
19	Kasi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian	S2	S1	III/d	III/b	
20	Kasi Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian	S1	S1	III/d	III/b	

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Kasi Alat Mesin Pertanian	S1	S1	III/d	III/b	
22	Kepala UPTD BBU Padi	S1	S1	III/d	III/b	
23	Kasubbag Tata Usaha UPTD BBU Padi	-	SLTA	-	III/a	lowong
24	Kepala UPTD BB Hortikultura	S1	S1	III/c	III/b	
25	Kasubbag Tata Usaha UPTD BB Hortikultura	S1	SLTA	III/c	III/a	
26	Kepala UPTD RPH	S2	S1	III/c	III/b	
27	Kasubbag Tata Usaha UPTD RPH	S1	SLTA	III/c	III/a	
28	Kepala UPTD RPU	S1	S1	III/c	III/b	
29	Kasubbag Tata Usaha UPTD RPU	S1	SLTA	III/c	III/a	
30	Kepala UPTD Pembibitan Ternak	SLTA	S1	III/c	III/b	
31	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak	SLTA	SLTA	III/c	III/a	
32	Kepala UPTD BPP Kecamatan Teluk Bayur	S1	S1	III/d	III/b	
33	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Teluk Bayur	-	SLTA	-	III/a	lowong
34	Kepala UPTD BPP Kecamatan Gunung Tabur	S1	S1	III/d	III/b	
35	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Gunung Tabur	-	SLTA	-	III/a	lowong
36	Kepala UPTD BPP Kecamatan Sambaliung	-	S1	-	III/b	lowong
37	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Sambaliung	-	SLTA	-	III/a	lowong
38	Kepala UPTD BPP Kecamatan P. Derawan	S1	S1	IV/d	III/b	
39	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec P Derawan	-	SLTA	-	III/a	lowong
40	Kepala UPTD BPP Kecamatan Segah	S1	S1	III/d	III/b	
41	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Segah	-	SLTA	-	III/a	lowong
42	Kepala UPTD BPP Kecamatan Kelay	S1	S1	III/d	III/b	

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Kelay	-	SLTA	-	III/a	lowong
44	Kepala UPTD BPP Kecamatan Tabalar	S1	S1	III/d	III/b	
45	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Tabalar	-	SLTA	-	III/a	lowong
46	Kepala UPTD BPP Kecamatan Biatan	S1	S1	III/d	III/b	
47	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Biatan	-	SLTA	-	III/a	lowong
48	Kepala UPTD BPP Kecamatan Talisayan	SLTA	S1	III/d	III/b	
49	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Talisayan	-	SLTA	-	III/a	lowong
50	Kepala UPTD BPP Kecamatan Batu Putih	S1	S1	III/c	III/b	
51	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Batu Putih	-	SLTA	-	III/a	lowong
52	Kepala UPTD BPP Kecamatan Biduk-Biduk	S1	S1	III/c	III/b	
53	Kasubbag Tata Usaha UPTD BPP Kec Biduk-Biduk	-	SLTA	-	III/a	lowong

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aparatur Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yang telah mengisi jabatan struktural berdasarkan latar belakang pendidikan serta kepangkatan sebagai dapat dilihat bahwa dari 53 (lima puluh tiga) jabatan struktural yang tersedia, telah terisi 39 (tiga puluh sembilan) dan 14 (empat belas) jabatan yang masih lowong, yaitu Jabatan Kepala Seksi Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian, Jabatan Kepala UPTD BPP Kecamatan Sambaliung, Jabatan Kasubbag Tata Usaha UPTD BBU Padi, dan Kasubbag Tata Usaha pada 11 (sebelas) UPTD BPP.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi karena manusia merupakan subyek dalam

pelaksanaan kegiatan. Karena suatu sistem manajemen akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai perencana dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Besarnya komposisi jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, maupun pegawai yang memiliki keahlian teknis, diharapkan memberikan andil yang signifikan dalam pengembangan kualitas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi teknis dilapangan yang terdiri dari pelayanan, pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau membutuhkan sumber daya manusia teknis/fungsional untuk kegiatan Pertanian yaitu PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Rincian tenaga PPL (PNS dan THL) yang tersedia saat ini sebagai berikut :

Tabel 5
Sumber Daya Manusia Fungsional Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian

No.	Golongan	Ruang				Status Kepegawaian		Jumlah
		a	b	c	d	CPNS	PNS	
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2	Golongan II	8	2	6	-	12	4	16
3	Golongan III	10	9	4	6	7	22	29
4	Golongan IV	3	-	-	-	-	3	3
5	Non PNS						-	25
Total						19	29	48

Tabel 6
Sumber Daya Manusia Fungsional Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		THL	Total
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	9	4	5	18
4	Diploma	6	2	1	9
5	SI	19	8	8	35
6	S2	-	-	-	-
Jumlah		34	14	14	62

Untuk sumber daya manusia teknis/fungsional Peternakan diantaranya adalah tenaga medik dan paramedik, dengan rincian yang tersedia saat ini sebagai berikut:

1. Medik Veteriner

- Puskesmas Talisayan : drh. Ahmad Najib MR
- Puskesmas Biatan : drh. Faqih Amrulloh

2. Paramedik Veteriner

- Puskesmas Batu Putih : Sumedi, S.PKP dan Melly Meriem
- Puskesmas Talisayan : Nopan Basri, A.Md
- Puskesmas Biatan : Mujtahid dan M. Said
- Puskesmas Gunung Tabur : L.M. Abdul Azis A, A.Md
- Puskesmas Segah : Maskur

3. Kantor Dinas

- Medik Veteriner : drh. Novi W dan drh. Iwan K
- Paramedik Veteriner : Reza Putri, A.Md, Wito, Massiri A, Sarmun

Tenaga paramedik ini dibayarkan melalui honorarium kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan (21.06) yang terdapat di Bidang Kesehatan

Hewan dan Kesmavet. Berdasarkan jumlah ketersediaan tenaga tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia masih kurang, minimal setiap Puskesmas terdapat 1 Medik dan 2 Paramedik Veteriner agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Sarana dan Prasarana/Aset

Ketersediaan sarana dan prasarana adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 7
REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tanah	m ²	93.192	-	-	93.192	-	100%
2.	Gedung	Unit	9	-	-	9	-	100%
3.	Listrik	Unit	7	-	-	7	-	100%
4.	Air	Unit	2	-	-	2	-	100%
5.	Telepon	Unit	-	-	-	-	1	0%
6.	Area Parkir	Buah	1	-	-	1	2	50%
7.	Ruang Rapat	Ruangan	1	-	-	1	-	100%
8.	Ruang Arsip	Buah	-	-	-	-	1	0%
9.	Koperasi	Unit	1	-	-	1	-	100%
10.	Taman Dalam	-	-	-	-	-	-	0%
11.	Kantin	Unit	1	-	-	1	-	100%
12.	Musholla	Unit	-	-	-	1	-	0%
13.	Kendaraan Roda 4	Unit	9	-	-	9	10	90%
14.	Kendaraan Roda 2	Unit	78	-	-	78	85	91,76%
15.	Meja Rapat	Unit	3	-	-	3	-	100%
16.	AC	Unit	25	-	-	25	-	100%
17.	Komputer PC	Unit	46	-	-	46	50	92%

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	Komputer Notebook	Unit	12	-	-	12	15	80%
19.	Meja Kerja	Unit	55	-	-	55	-	100%
20.	Kursi Kerja	Unit	40	-	-	40	-	100%
21.	Filling Kabinet	Unit	11	-	-	11	-	100%
22.	Rak Arsip	Unit	1	-	-	1	-	100%
23.	Infokus	Unit	4	-	-	4	-	100%
24.	Jaringan Internet	Unit	1	-	-	1	-	100%
25.	Area Taman Luar	-	1	-	-	1	-	100%
26.	Lemari Arsip	Unit	19	-	-	19	-	100%

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Produksi Komoditas Tanaman Pangan

Adapun gambaran kondisi aktual pencapaian kinerja produksi dan luas panen periode 2013 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
LUAS PANEN DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN KABUPATEN
BERAU PERIODE 2013-2016

No	Komoditas	Luas Panen (ha)				Produksi (ton)			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1.	Padi Sawah	5.911	5.225	4.944	4.653,7	20.716,54	19.018,04	17.998,08	16.542,10
2.	Padi Ladang	8.371	8.523	7.912	7.734	17.377	17.689	13.870	11.089
3.	Jagung	630	1.545	1.072	2.819	1.381	3.990	4.555	15.460
4.	Kedelai	278	401	574	501	610	652	1.011	793,58

Data tersebut menunjukkan bahwa luas panen dan produksi dan produktivitas padi sawah sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Untuk padi ladang, produksi dan luas panen juga mengalami penurunan.

Luas panen, produksi dan produktivitas jagung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Budidaya jagung di Kabupaten Berau didominasi oleh jagung manis yang dipanen muda. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan untuk jagung panen muda serta harganya relatif lebih tinggi dibanding harga jual jagung pipilan kering.

Namun demikian, untuk jagung yang dipanen muda ini, produksinya tidak dapat masuk dalam pencatatan BPS (BPS hanya mendata produksi jagung pipilan kering). Luas panen dan produksi kedelai cenderung fluktuatif, disebabkan budidaya kedelai memerlukan kemampuan dan perhatian serius sejak turun benih sampai panen dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Disamping itu, kedelai impor yang membanjiri pasar menyebabkan kedelai lokal kalah bersaing dalam hal kualitas dan harga. Tetapi dari sisi produktivitas terjadi kenaikan karena adanya bantuan benih, pupuk dan pestisida sumber dana APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan APBN.

Capaian program prioritas pada pelaksanaan RPJMD Periode 2011-2015 secara umum dapat dikategorikan cukup baik, hal tersebut seperti tergambar pada tabel berikut:

TABEL 9
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BERAU TAHUN
2011 – 2015

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Ket
			Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tercapainya Kebutuhan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	104.14 3,78	38.254. 000,00	36.731, 91	104.14 3,78	44.218. 000,00	42.458, 61	104.14 3,78	53.188. 000,00	51.071, 70	104.14 3,78	54.295. 000,00	52.134, 65	150.00 0,00	54.295. 000,00	36.196, 67	
	Meningkatnya Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Ton/Ha	3,10	3,26	105,16	3,10	3,16	101,93	3,10	3,30	106,45	3,10	3,28	105,81	5,00	3,28	65,60	
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	3,49	2,03	58,17	3,49	2,06	59,03	3,49	1,96	56,16	3,49	5,09	145,84	10,00	5,09	50,90	

Gambaran Populasi Ternak dan Produksi Komoditas Sub Sektor Peternakan

Pencapaian populasi ternak

Berdasarkan evaluasi pertumbuhan dan perkembangan populasi ternak untuk beberapa komoditi terlihat pertumbuhan dengan tren meningkat seperti pada ternak sapi potong, kerbau dan ternak kambing. Hal ini lebih disebabkan oleh intervensi kegiatan yang bersifat bantuan fisik ternak, peningkatan pengetahuan peternak dalam manajemen pemeliharaan, penyediaan pakan, dan penanggulangan penyakit ternak serta diintensifikannya program Inseminasi Buatan (IB). Selain itu juga peningkatan ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Berau. Gambaran pertumbuhan tiap komoditi untuk ternak ruminansia dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10

Capaian Pertumbuhan dan Perkembangan Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Berau kurun waktu 2009-2015

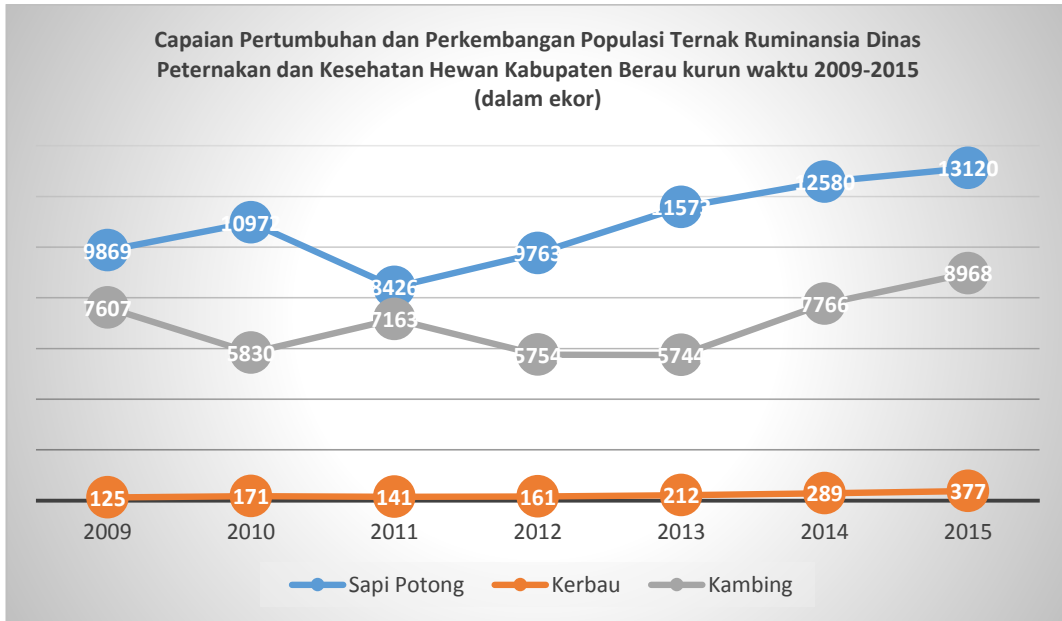
Tahun	Sapi Potong (ekor)	Kerbau (ekor)	Kambing (ekor)
2009	9.869	125	7.607
2010	10.972	171	5.830
2011	8.426	141	7.163
2012	9.763	161	5.754
2013	11.573	212	5.744
2014	12.580	289	7.766
2015	13.120	377	8.968

Data tersebut dapat menunjukkan bahwa perkembangan ternak ruminansia dari tahun ke tahun terjadi peningkatan namun pada tahun 2011 terjadi penurunan populasi ternak sapi dan kambing hal ini dikarenakan ternak kambing pada tahun ini mengalami penurunan angka kelahiran dan

pemotongan yang sangat tinggi serta permintaan luar Kabupaten Berau yang cukup besar.

Grafik 2

Perkembangan ternak ruminansia dari tahun 2009-2015



Sedangkan untuk ternak unggas trend pertumbuhannya menunjukkan trend meningkat terutama pada ternak ayam pedaging hal ini diakibatkan karena beternak ayam pedaging sangat menguntungkan dimana masa panen yang cukup singkat. Hanya dalam waktu 40 hari ayam pedaging sudah dapat dipanen. Hal ini membuat peternak yang memiliki modal terbatas dapat lebih cepat memutar modal dan memetik keuntungan. Selain itu pemasaran dari daging ayam pedaging cukup mudah karena animo masyarakat akan daging yang satu ini cukup besar. Gambaran pertumbuhan untuk tiap komoditi ternak unggas dapat dilihat pada Tabel II berikut:

Tabel II

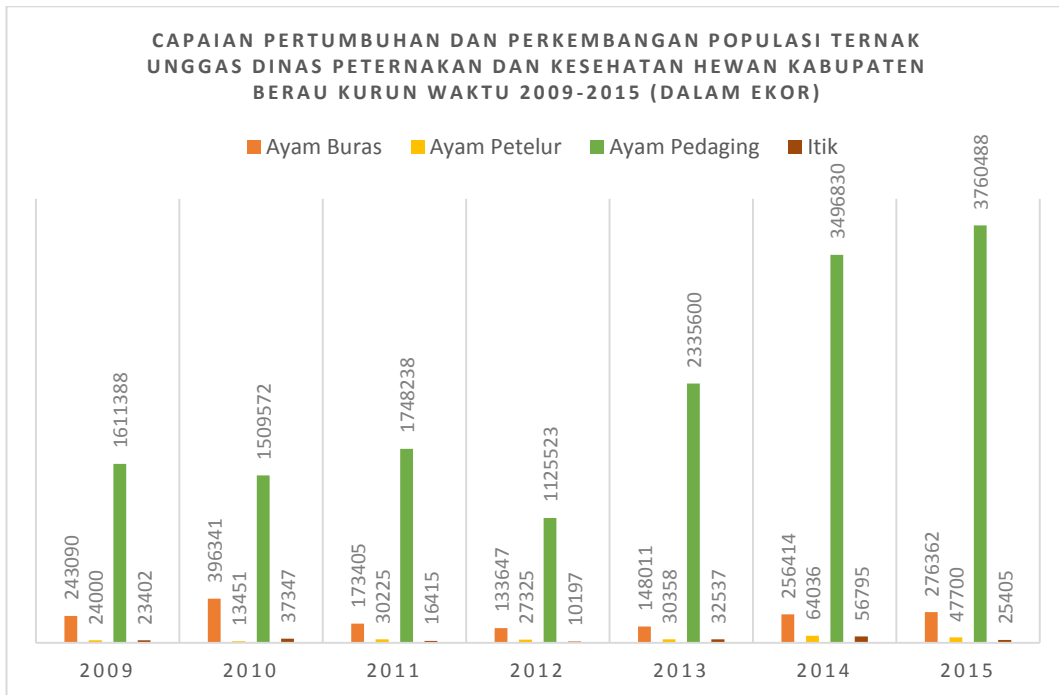
**Capaian Pertumbuhan dan Perkembangan Populasi Ternak Unggas
Kabupaten Berau kurun waktu 2009-2015**

Tahun	Ayam Buras (ekor)	Ayam Petelur (ekor)	Ayam Pedaging (ekor)	Itik (ekor)
2009	243.090	24.000	1.611.388	23402
2010	396.341	13.451	1.509.572	37.347
2011	173.405	30.225	1.748.238	16.415
2012	133.647	27325	1.125.523	10.197
2013	148.011	30.358	2.335.600	32.537
2014	256.414	64.036	3.496.830	56.795

Grafik berikut dapat menunjukkan bahwa perkembangan ternak Unggas Kabupaten Berau dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan khusus pada Ayam pedaging tahun 2013 mencapai 2.335.600 ekor meningkat menjadi 3.496.830 ekor pada tahun 2014, begitu juga pada jenis unggas lainnya, peningkatan ini merupakan prestasi bagi Berau dalam memenuhi kebutuhan daging Unggas dan secara analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Berau telah mencapai swasembada daging unggas khususnya ayam potong pedaging, bahkan bisa mensuplay Provinsi Kalimantan Utara.

Grafik 3

Perkembangan ternak Unggas Kabupaten Berau dari tahun 2009-2015



Pencapaian Produksi Sub Sektor Peternakan

Produksi daging

Sejalan dengan Grafik perkembangan populasi ternak ruminansia, produk peternakan terutama daging pada ternak ruminansia mengalami peningkatan secara otomatis, hal ini dikarenakan populasi ternak yang memadai akan berdampak pada besarnya pemotongan yang akan berkorelasi pada jumlah produksi daging. Peningkatan produksi daging ternak ruminansia terjadi pada tahun 2012 yakni dari 98,33 ton meningkat menjadi 106,67 ton pada tahun 2013 dan diakhir periode 2015 mencapai puncak yakni Perkembangan produksi daging ternak ruminansia periode tahun 2009 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12

Perkembangan produksi daging ternak ruminansia periode tahun 2009-2015

Tahun	Sapi Potong/Kerbau (ton)	Kambing (ton)
2009	130,72	9,10
2010	286,679	10,733
2011	300,90	15,22
2012	358,231	15.755
2013	506,996	29.271
2014	453,095	31.578
2015	506,996	26.359

Grafik berikut dapat menunjukkan bahwa perkembangan produksi daging ternak ruminansia dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, namun pada ternak kambing terjadi penurunan yaitu pada tahun 2013 yakni 76.98 ton menurun menjadi 76.43 ton pada tahun 2014, hal ini dikarenakan populasi ternak kambing mengalami penurunan jumlah yang berkorelasi pada berkurangnya jumlah pemotongan dan berdampak pada penurunan produksi daging ternak kambing.

Grafik 4
Perkembangan produksi daging ternak ruminansia periode
tahun 2009-2015



Dari sektor unggas dapat diinformasikan angka produksi daging khusus dari ayam ras pedaging periode 2009–2015 dapat dilihat dari tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13

Data produksi daging ayam ras pedaging

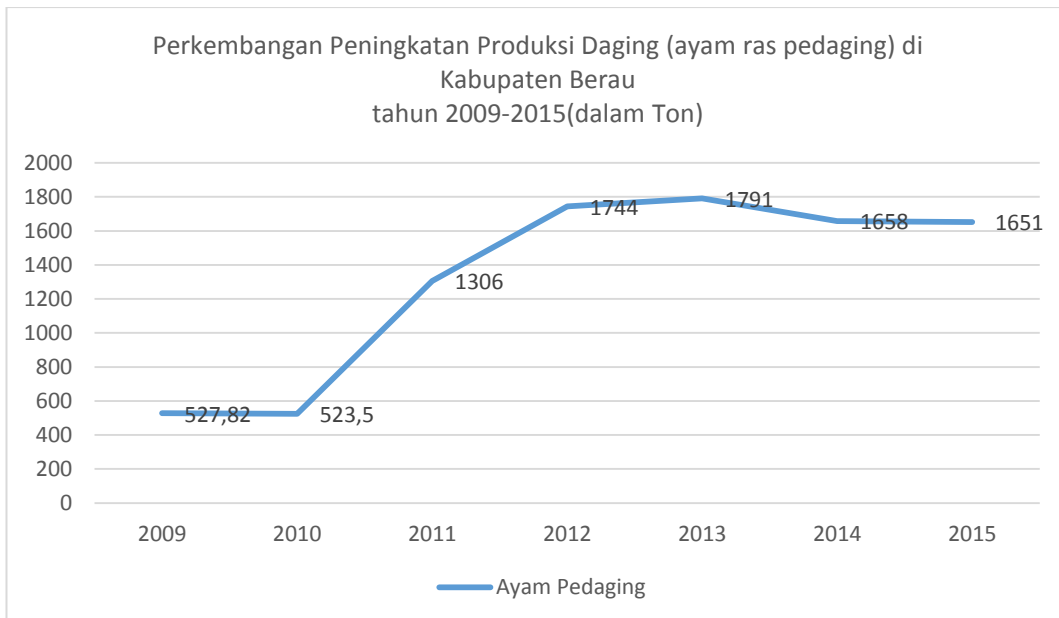
Tahun	Daging (ayam ras pedaging)/ (ton)
2009	527,82
2010	523,5
2011	1.306
2012	1.744
2013	1.791
2014	1.658
2015	1.651

Produksi daging ternak unggas juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya yakni pada tahun 2010 sebanyak 523,5 ton produksi ayam pedaging pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.658 ton. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh minat masyarakat yang cukup tinggi dalam

beternak ayam pedaging dan adanya mitra dari berbagai perusahaan yang bergerak dibidang perbibitan ayam pedaging sehingga memudahkan masyarakat pelaku usaha ayam pedaging. Sentra ayam pedaging dikabupaten Berau berada di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Teluk Bayur. Peningkatan produksi juga disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berusaha dan beternak ayam pedaging cukup memadai. Grafik 5 menunjukkan perkembangan peningkatan produksi daging di Kabupaten Berau.

Grafik 5

Perkembangan Peningkatan Produksi Daging (ayam ras pedaging) di Kabupaten Berau dari tahun 2009-2015



Produksi telur unggas juga mengalami peningkatan khususnya telur ayam buras (kampung), ras petelur itik, peningkatan ini disebabkan adanya peralihan dari konsumsi daging ternak ruminansia ke konsumsi daging ternak unggas sehingga berdampak pada tingginya tingkat minat masyarakat untuk budidaya ternak ayam buras karena beternak ayam buras sangat mudah untuk dibudidayakan. Seiring dengan banyaknya

populasi ayam buras maka berkorelasi positif dengan jumlah produksi telur khususnya telur ayam buras.

Fluktuasi produksi telur pada tabel 14 sebagai berikut:

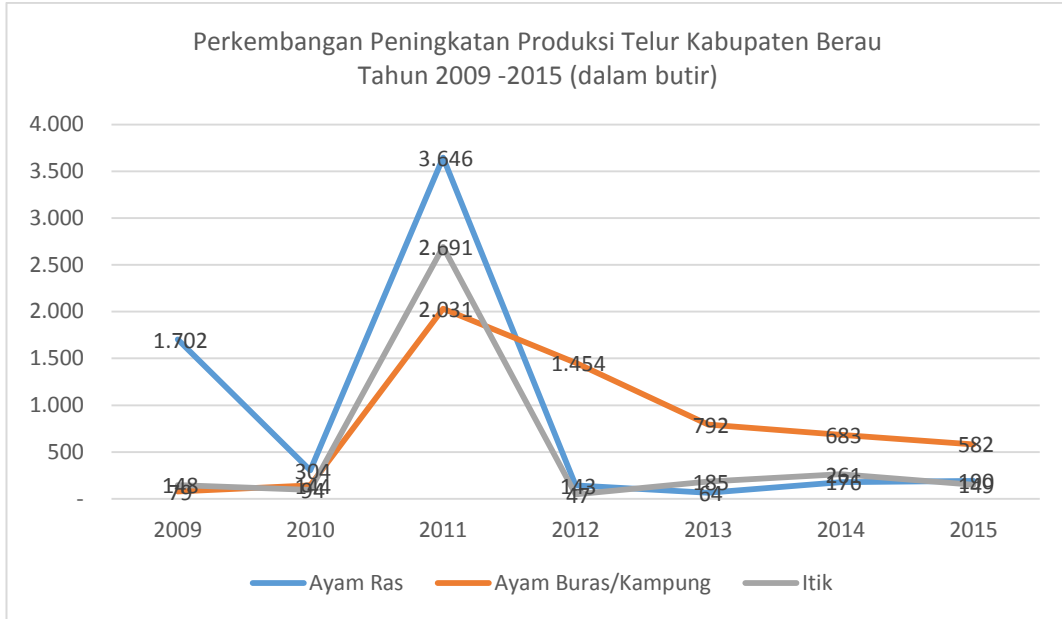
Tabel 14
Data populasi unggas (ayam ras, buras, itik)

Tahun	Ayam Ras (Ton)	Ayam Buras (Kampung) Ton	Itik
2009	79.296	1.701,6	147.840
2010	144.000	303,862	93.607
2011	2.031.360	3.645.500	2.691.136
2012	1.454.449	143.229	46.929
2013	791.597	63,995	1.84.655
2014	682.594	176,413	261.384
2015	582.409	190.137	149.403

Grafik perkembangan peningkatan produksi telur Kabupaten Berau dari Tahun 2009 -2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 6

Perkembangan Peningkatan Produksi Telur Kabupaten Berau dari Tahun 2009 -2015



Pencapaian Konsumsi produk peternakan

Konsumsi daging dan telur kg/kapita/tahun di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan peningkatan yang fluktuatif pada periode 2009 - 2014, dimana tahun 2013 sebanyak 12.10 kg/kapita/tahun dan pada 2014 meningkat 13,12 kg/kapita/tahun. Sedangkan pada konsumsi telur tidak terjadi peningkatan yang signifikan, bukan berarti kurang minat masyarakat pada konsumsi telur tapi stock/persediaan yang masih sangat kurang. Begitu juga minat konsumsi susu di masyarakat juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Gambaran lebih jelas mengenai data konsumsi produk peternakan di Berau dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 15

Data Konsumsi Daging dan Telur di Kabupaten Berau Tahun 2005-2015

Tahun	Daging (Kg/kapita/thn)	Telur (Kg/kapita/thn)
2009	10.98	6.42
2010	11.26	7.6
2011	11.54	8.78
2012	11.82	9.96
2013	12.10	6.31
2014	13.12	7.88
2015	12.12	4,69

Data produksi daging dan telur diatas adalah sigma dari produk lokal dan pemasukan, karena sumber daya lokal belum bisa memenuhi permintaan produk peternakan yang dibutuhkan masyarakat. Berangkat dari kondisi inilah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau pada periode RENSTRA 2016 – 2020 bertekad untuk :

1. Meningkatkan ketersediaan produk peternakan daging (sapi, kambing, ayam, babi dan itik) dan telur unggas
2. Menurunkan kasus penyakit strategis ternak
3. Mewujudkan kampung mandiri energi ramah lingkungan asal kotoran ternak
4. Meningkatkan promosi produk pangan asal ternak yang *marketable*

Capaian Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2009 – 2015

Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran begitu juga pembangunan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat di atasi

pada masa yang akan datang. Evaluasi anggaran ini menggunakan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil evaluasi pada target dan realisasi anggaran Renstra Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau Tahun 2009- 2015 maka dapat dilihat pagu anggaran dan realisasi Anggaran sebagai berikut :

Tabel 16

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 – 2015 dari berbagai sumber dana

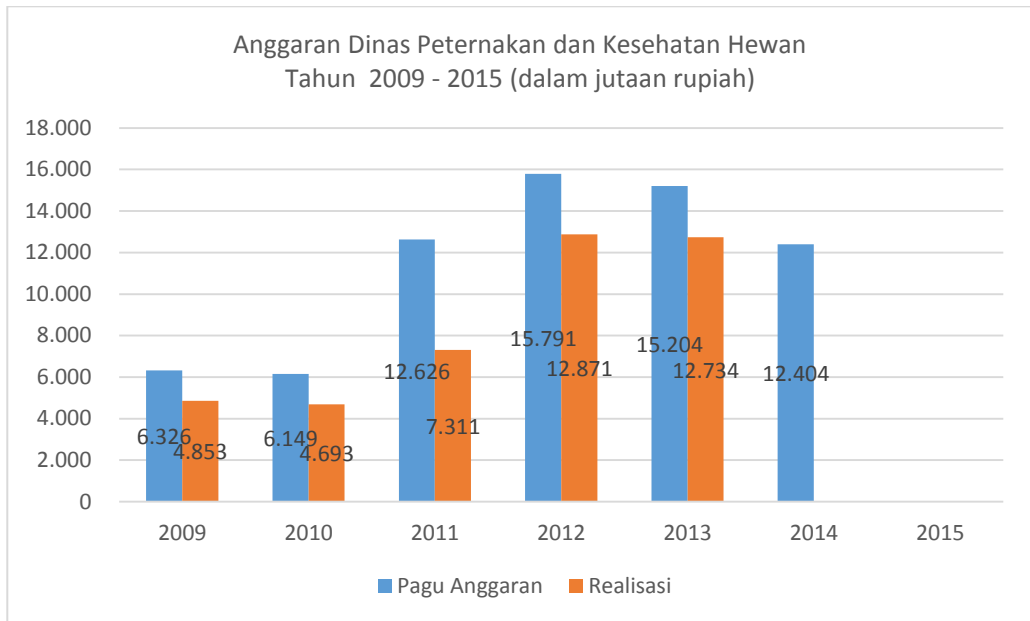
Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2009	6.325.637.500	4.853.237.200	76,72
2010	6.148.890.000	4.692.508.230	74,97
2011	12.626.351.480	7.311.232.190	57,90
2012	15.790.720.000	12.870.521.682	81,97
2013	15.204.180.000	12.733.945.533	83,74
2014	12.403.603.000	9.752.061.325	78,62
2015	13.114.846.600	10.192.398.499	77,72

Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan periode tahun di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan peningkatan yang fluktuatif, dimana tahun 2010 Anggaran pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sangat rendah yakni Rp. 6.148.890.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.692.508.230 atau 74,97 sedangkan Anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni Rp. 15.790.720.000 dengan realisasi 12.870.521.682 atau 81,97% Gambaran lebih jelas mengenai Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Berau dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 7

Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Berau

tahun 2009 - 2014



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ke Depan

Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian tanaman pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memprioritaskan pada upaya peningkatan produksi, produktifitas, mutu produk dan nilai tambah untuk menuju swasembada pangan, peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas, terukur dan berkelanjutan.

Sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, baik yang terkait dengan

metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya, seperti pemanfaatan Sistem Pelaporan SIMON TEPR, Selain itu, peningkatan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi SDM Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau terus dipacu mengingat hasil kerja SKPD sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan aparatur pelaksanaannya.

Terorganisirnya data dan informasi pembangunan pertanian merupakan salah satu prioritas program kedepan, sehingga Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pembangunan sektor terkait lainnya. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau akan melakukan segala upaya untuk menjamin produk pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan mampu berdayaguna dan berdaya hasil bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Permintaan Pasar terhadap komoditas pertanian dan peternakan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, kesadaran akan kebutuhan gizi dan perbaikan tingkat pendidikan, kondisi ini menjadi peluang usaha di bidang pertanian dan peternakan semakin terbuka. Tersedianya sumber daya alam potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi daya dukung pengembangan usaha sektor pertanian dan peternakan. Sumber permodalan dari pemerintah dan perbankan cukup tinggi untuk usaha sektor pertanian dan peternakan dalam bentuk kredit usaha dengan bunga ringan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi subsektor tanaman pangan dan Peternakan dimasa mendatang antara lain:

1. Persentase Tenaga Kerja Pertanian yang Menurun

Sebagai bagian dari negara agraris, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Berau. Walaupun masih besar, namun, persentase jumlah tenaga kerja yang ada di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penyebab utama merosotnya jumlah tenaga

kerja di sektor pertanian adalah terlalu kecilnya pendapatan dari pekerjaan sebagai petani. Rendahnya pendapatan petani juga terkait erat dengan kepemilikan lahan petani.

Dengan rendahnya pendapatan di sektor pertanian, perpindahan profesi dari sektor pertanian ke sektor lainnya, terutama ke sektor industri tidak bisa terhindarkan lagi. Masyarakat memilih bekerja di sektor yang memberikan penghasilan besar.

Merosotnya persentase tenaga kerja di sektor pertanian harus segera ditanggapi serius oleh pemerintah daerah dengan kebijakan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan petani seperti mengembangkan bantuan permodalan dan penerapan manajemen teknologi pertanian. Upaya tersebut harus diikuti dengan upaya perbaikan di sektor pasca panen. Petani sering kali tidak mendapatkan harga jual yang baik di saat panen tiba. Karena itu, pemerintah akan menjamin hasil panen bisa terserap dengan baik dan dengan harga yang menguntungkan. Peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terjun ke sektor itu.

2. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi subsector pertanian tanaman pangan dampak lanjutannya adalah bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman serta pada akhirnya penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi hal ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapang dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi yang diperlukan.

3. *Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan dan air masih terbatas*

Prasarana pertanian yang saat ini memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru dan rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian menurun. Tantangan yang dihadapi bagaimana meningkatkan partisipasi petani dalam perlindungan DAS, Pemeliharaan jaringan irigasi desa, pengembangan sumber-sumber air alternative serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan hujan.

Prasarana lain yang dibutuhkan namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan Usahatani dan jalan produksi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan prasarana yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup.

Disisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi belum tersedianya benih/bibit unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian hingga ketingkat usahatani serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Tantangan kedepan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani menggunakan pestisida yang ramah lingkungan.

4. *Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani*

Petani belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan kedepan adalah

bagaimana pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan.

5. *Terjadinya alih fungsi lahan dari sub sektor tanaman pangan ke sub sektor non pertanian lainnya*

Meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan diluar sub sektor pertanian tanaman pangan dan Peternakan seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun tapi juga semakin sempitnya luas garapan usahatani, degradasi tradisi dan budaya pertanian serta turunnya kesejahteraan petani. Tantangan untuk menghadapi ini bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian yang ada, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan.

6. *Rendahnya nilai tukar petani (NTP)*

Umumnya petani tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsistem, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Selain itu petani belum memiliki fasilitas penyimpanan hasil pascapanen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Ini berakibat banyak petani yang terlibat ke dalam system ijon dan/atau tengkulak. NTP sebagai indicator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani kondisinya di Kabupaten Berau selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif.

7. *Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani*

Kondisi organisasi petani lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar bagi pengembangan usahatani usaha pertanian. Tantangan kedepan

bagaimana kelembagaan petani ini merevitalisasi diri dari kelembagaan pembinaan teknis dan social menjadi kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum dan berintegrasi dalam koperasi yang ada dipedesaan.

8. *Belum padunya antar sektor penunjang pembangunan pertanian*

Pembangunan pertanian tidak bisa berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor masih sulit dilaksanakan.

Permasalahan tersebut diatas, menyebabkan tingkat produksi, produktivitas, mutu dan daya saing pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan belum mencapai titik optimal. Karena itu permasalahan tersebut perlu diatasi secara berkesinambungan serta menjadi fokus program pengembangan pelayanan SKPD pada tahun 2016–2021.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH****Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau**

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan pokok beserta akar permasalahan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17

**MASALAH POKOK, MASALAH DAN AKAR MASALAH SESUAI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN BERAU**

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
Bidang Pertanian		
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Petani belum maksimal melaksanakan teknik budidaya tanaman secara benar sesuai petunjuk yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan bibit unggul, akses untuk mendapatkannya masih sulit karena didatangkan dari luar daerah (ketersediaan bibit unggul masih terbatas) • Pengolahan tanah belum maksimal, masih banyak yang menggunakan sistem TOT khususnya untuk tanaman padi lahan kering dan jagung • Biaya buka lahan dan pengolahan tanah relatif mahal • Pemeliharaan tanaman sering diabaikan/ditinggalkan • Bertani bukan merupakan pekerjaan utama (hanya sambilan)

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil yang diharapkan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari • Komoditi yang dibudidayakan sering berganti-ganti
	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan benih unggul bermutu masih rendah/kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya penangkar benih • Petani kesulitan untuk mendapatkan benih unggul yang bersertifikat • Pengawas Benih tidak ada
	<ul style="list-style-type: none"> • Benih buah-buahan (hortikultura) yang dibantu ke petani sangat terbatas dengan pola pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya harga benih unggul buah-buahan • Penagkar benih masih kurang • Dukungan APBD tingkat II sangat rendah
	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan yang dimiliki oleh sebagian besar petani relatif sempit (Pertanian skala kecil) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan pertanian • Menurunnya tingkat kesuburan tanah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi yang masih sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan petani mengenai teknologi tepat guna masih terbatas • Apresiasi dari pemerintah untuk

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
		penemuan teknologi baru masih kurang
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Pupuk dan Harga yang mahal 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak antara lini III (Distributor) dan lini IV (Pengecer) untuk sentra tanaman pangan cukup jauh. • Subsidi transportasi dari lini III ke lini IV tidak mencukupi, sehingga petani terbebani biaya tambahan biaya transportasi • Rendahnya biaya subsidi transportasi distribusi pupuk
	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pupuk masih sangat rendah belum sesuai dengan anjuran dosis yang direkomendasikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Petani belum memahami secara pasti dosis pemupukan yang dianjurkan masing-masing komoditi • Daya beli petani masih sangat rendah untuk pupuk • Petani tidak menerapkan sistem 6 tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga)

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
		untuk pemupukan tanaman.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit sering diabaikan oleh petani sehingga berdampak pada produksi panen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang tersedianya pestisida untuk petani (stok terbatas) • Petani pada umumnya belum bisa membedakan antara serangan hama atau serangan penyakit • Daya beli petani untuk pestisida sangat rendah • Belum mantapnya sistem dan pelayanan penyuluhan oleh PPL dan PPHP • Laporan serangan HPT dari petugas lapangan belum optimal
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran pupuk bersubsidi ke petani belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua kecamatan terdapat pengecer pupuk bersubsidi • Kondisi geografis Kabupaten Berau cukup berat dan jarak antar kecamatan cukup jauh.
	<ul style="list-style-type: none"> • Modal yang dimiliki oleh petani sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan petani untuk mengakses lembaga keuangan formal

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
		sangat rendah <ul style="list-style-type: none"> • Petani tidak memiliki agunan sebagai jaminan • Kurangnya bantuan finansial terhadap petani dari pemerintah • Bunga perbankan masih tinggi
	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pasaran hasil pertanian yang sifatnya masih sempit dan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • KUD/BUMK belum mengakomodir hasil-hasil pertanian di desa • Hasil-hasil pertanian belum dikemas sehingga tidak tahan lama • Produk lanjutan hasil pertanian masih kurang
	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi pasca panen dikalangan petani sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya alat pengolah hasil termasuk kemasan dan izin usaha
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan mengenai pemasaran hasil pertanian/penyaluran hasil pertanian sehingga semangat berusaha tani kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumen yang menginginkan kualitas yang baik • Pasar komoditas terkadang masih belum pasti
	<ul style="list-style-type: none"> • Tarik ulur kebijakan pemberian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan BBM jenis tertentu untuk kegiatan

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
	rekomendasi BBM jenis tertentu	pertanian yang masih sering disalahgunakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada peran dari pemerintah daerah mengenai usaha pengenalan produk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya promosi dan ekspos
Bidang Prasarana, Sarana, dan Kelembagaan Pertanian		
Sarana dan Prasarana Pertanian Masih Kurang Memadai, serta Kelembagaan Pertanian juga belum berjalan dengan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Produksi yang Ada di Kelompok Tani/ Kampung Masih Kurang dan Kurang Terpelihara 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika Jalan Produksi terbatas, maka akan terjadi kendala untuk membawa Sarana Produksi Pertanian menuju lahan Budidaya dan untuk membawa hasil panen keluar untuk dipasarkan. • Jika Akses jalan produksi tidak terpelihara dengan baik maka akan menyulitkan Alat Mesin Pertanian dan Kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk keluar masuk lahan Budidaya.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran Tersier Kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengairan ke Sawah masih terbatas/belum merata

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> Pintu Air Kurang Tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitas air masih belum bisa diatur sesuai dengan keperluan petani
	<ul style="list-style-type: none"> Dam Parit Kurang Tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> Permukaan air lebih rendah dari permukaan sawah sehingga air tidak bisa naik ke areal persawahan.
	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Sarana Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya bantuan pemerintah Lemahnya permodalan petani Adanya bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani Mahalnya harga alat mesin pertanian
	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pengetahuan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya tingkat pendidikan petani Masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada petani Usia petani yang sebagian besar sudah lanjut Minimnya akses/informasi petani
	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya fungsi kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya manajerial petani

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
	yang ada dalam memanfaatkan bantuan alsintan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran petani • Kurangnya informasi/sosialisasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diterapkannya teknologi saptas usaha/pancas usaha tani secara maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat berkompetisi dengan komoditas lain yang lebih mudah dan lebih jelas penanganannya pasca panennya. • Masih rendahnya pH tanah dan pH air sebagai faktor utama pertumbuhan • Belum adanya sistem irigasi teknis.
Belum optimalnya kapasitas SDM penyuluh dan kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak penyuluh yang belum menerapkan sistem penyuluhan secara maksimal dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya sistem administrasi penyuluh
	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi kelompok tani belum diterapkan secara benar dan terarah oleh pengurus dan anggota kelompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya rasa saling kurang percaya antara kepengurusan kelompok tani • Masih cukup banyak kompetisi lapangan kerja yang hasilnya lebih jelas

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
Bidang Peternakan		
Produksi Daging Masih Rendah dan Penerapan teknologi yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Budidaya ternak besar sebagian besar masih menggunakan sistem pemeliharaan ekstensif 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar petani peternak masih beranggapan bahwa beternak sebagai pekerjaan sampingan sehingga budidaya dan sistem pemeliharaan masih alami
	<ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan penerapan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan Inseminasi Buatan (IB) di tingkat peternak belum merata, keahlian peternak dalam mendeteksi berahi masih kurang, tingkat partisipasi peternak dalam pelaporan keadaan biologis ternak masih minim, recording siklus biologi ternak baik peternak maupun petugas belum dijalankan secara maksimal.
	<ul style="list-style-type: none"> Pembibitan ternak rakyat belum berkembang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang pedulinya peternak terhadap bibit ternak yang baik sehingga banyak bibit ternak yang berkualitas habis dijual

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
		dan dipotong.
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya melakukan pembinaan pengembangan hijauan melalui program intensifikasi, ekstenfikasi dan partisipasi aktif petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran untuk melakukan pembinaan ke kelompok
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM dan bimbingan ke peternak dalam pengembangan teknologi pemanfaatan limbah hasil pertanian, pakan hijauan dan hasil perkebunan melalui sistem pertamanan dan hasil produksinya masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan ilmu pengetahuan dan kesadaran peternak dalam mengolah hasil samping limbah pertanian dan perkebunan masih rendah
	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran peternak dalam menggunakan alat mesin peternakan masih kurang dan pelaksanaan bimbingan dari Dinas dalam pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan ilmu pengetahuan dan kesadaran peternak dalam menggunakan alat mesin peternakan baik untuk mengolah pakan maupun hasil limbah

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
	<p>rekayasa dan kaji terap alat dan mesin peternakan supaya lebih berhasil dan berdaya guna.</p>	<p>masih kurang.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Produk utama peternakan di Kabupaten Berau berupa daging dan telur • Produk telur mulai banyak diproduksi oleh peternak di Kabupaten Berau, selebihnya didatangkan dari luar daerah (Sulawesi, Samarinda) • Produk susu seluruhnya didatangkan dari luar daerah oleh investor berupa produk olahan yaitu susu kaleng dan susu bubuk • Produk hasil limbah lainnya berupa feces 	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi ternak potong di Kabupaten Berau pada tahun 2017 sekitar 14.000 ekor, masih sangat kurang dibanding jumlah pemotongan yang ada (7-10) ekor per hari, sehingga masih mendatangkan ternak sapi potong dari luar daerah.

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
	dan urine banyak diproduksi sementara untuk usaha pribadi sebagai pupuk organik.	
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Pentingnya menjaga kesehatan ternak dan hewan peliharaan secara intensif dan mengkonsumsi daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pelayanan Keswan 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran pemerintah sehingga pengadaan fasilitas Pelayanan Puskesmas belum Terealisasi Maksimal
	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Tenaga Medic dan Paramedic Veteriner Baik Jumlah dan Kompetensinya 	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya kejadian kasus penyakit parasiter/cacingan pada sapi, scabies dan kembung pada kambing serta penyakit AI/ ND pada unggas.
	<ul style="list-style-type: none"> Usaha Pengolahan Hasil Produksi Peternakan Belum Optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak penyedia bahan pangan asal hewan/ ternak yang belum memahami ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 merupakan Visi Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Berau terpilih periode 2016-2021. Visi dan Misi ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan semangat membangun Kabupaten Berau lima tahun mendatang, melalui perumusan strategi dan sasaran pokok pembangunan yang tepat, arah kebijakan dan program-program unggulan pembangunan yang diselaraskan dengan kajian teknokratik.

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (impact) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi Pembangunan Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik,

maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN
BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan, pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 8
Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau



Sumber: *Global Green Growth Institute, 2013*

Dimensi pembangunan ekonomi hijau sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas juga makin relevan sebagai jawaban atas diintegrasikannya instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam RPJMD ini guna mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Tahapan dan prosedur dalam penyusunan RPJMD ini telah diupayakan secara maksimal agar memiliki dampak negatif lingkungan yang serendah mungkin, sekaligus untuk meningkatkan aspek keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya melalui KLHS.

Dalam tataran implementasi, pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis

sumberdaya alam yaitu sektor pertanian untuk menggeser dominasi sektor pertambangan. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya, pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus menerus.

Agrobisnis dapat terlaksana dengan tepat dan cepat melalui upaya percepatan penyiapan industri-industri pengolah hasil pertanian. Selanjutnya, proses ini dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola industri dan mata rantainya dari hulu ke hilir. Terkait dengan hal ini, dalam menunjang pergerakan agribisnis diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan kinerja akan menempatkan UKM dan UMKM yang tergabung dalam sentra-sentra industri menjadi variabel penting.

Selain agrobisnis, pengembangan sektor pariwisata juga mempunyai nilai dan pengaruh yang sangat vital terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Berau. Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa indahnyanya, Kabupaten Berau memiliki tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi obyek wisata jika dapat dikelola secara optimal, bahkan ada juga beberapa tempat pariwisata di Kabupaten Berau yang sudah menjadi tujuan berlibur bagi wisatawan asing. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan *resort*, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. Kabupaten Berau setidaknya mempunyai 37 potensi objek wisata yang bisa dikembangkan.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Berau memiliki pasar skala nasional maupun internasional jika dapat dikelola secara maksimal. Jika dilihat dari kondisi geografis, daerah ini memiliki keanekaragaman obyek wisata laut/bahari. Kemudian, potensi wisata kedua, berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah. Untuk potensi wisata terakhir, terdapat obyek wisata yang berasal dari kebudayaan unik masyarakat Kabupaten Berau. Agar potensi pariwisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pelaksanaan pengembangan agrobisnis dan pariwisata, yang harus menjadi pedoman ialah bagaimana seluruh lapisan masyarakat terutama kaum marginal dan masyarakat lokal untuk diberdayakan dan diajak untuk ikut berpartisipasi. Turut berpartisipasinya seluruh lapisan masyarakat harus diwujudkan yang bertujuan untuk meratakan keuntungan ekonomi dari pengembangan agrobisnis dan pariwisata tersebut. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian wilayah, namun juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata sehingga dapat tercipta kesejahteraan yang berkeadilan. Selain itu, dimensi keagamaan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Dengan naiknya kadar religiusitas masyarakat, diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga perbedaan suku dan agama tidak menjadi halangan yang berarti dalam membangun kehidupan bersama yang bahagia dan sejahtera. Disamping itu juga pengembangan wilayah secara menyeluruh dapat berkelanjutan jika dalam pelaksanaan pembangunannya selalu memerhatikan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu maka aspek kualitas lingkungan harus dijadikan landasan utama pengembangan tersebut.

Gambar 9
Hubungan Antarelemen Visi



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Sejahtera :

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

Unggul :

Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih

tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

Berdaya Saing:

Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kondisi Berau yang memiliki kemampuan ekonomi dimana masyarakat dapat berkompetisi secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk

barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kemampuan Berau untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

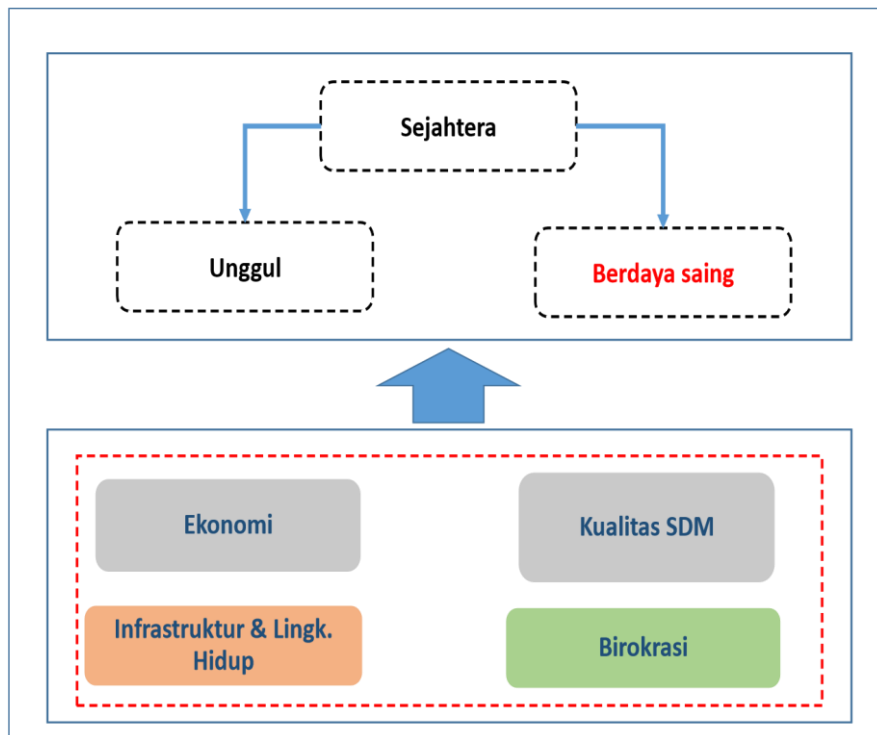
Misi Pembangunan Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

- 1. Misi Pertama:** Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- 2. Misi Kedua:** Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
- 3. Misi Ketiga:** Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
- 4. Misi Keempat:** Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Hubungan antar elemen visi dan misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 10
Hubungan Antar elemen Visi dan Misi



Di dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 terdapat permasalahan pembangunan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan lima tahun ke depan. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dinyatakan pada uraian permasalahan pertama yaitu: **“Masih Rendahnya Pertumbuhan Sektor Pertanian”**.

Dari masalah utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

1. Rendahnya Produksi Pertanian
2. Rendahnya Produksi Peternakan
3. Rendahnya Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelompok Tani

Tabel 18
Rumusan Permasalahan
“Masih Rendahnya Pertumbuhan Sektor Pertanian”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Rendahnya Produksi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan pertanian 2. Penyaluran sarana produksi pertanian masih belum optimal 3. Pengetahuan petani mengenai teknologi pertanian tepat guna masih terbatas 4. Ketersediaan alat mesin pertanian dan Infrastruktur pertanian belum memadai 5. Peran kelembagaan masih belum maksimal
2	Rendahnya Produksi Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan budidaya ternak masih terbatas 2. Keberhasilan penerapan Inseminasi Buatan (IB) masih rendah 3. Pembibitan ternak rakyat belum berkembang maksimal 4. Keterbatasan prasarana, sarana, serta tenaga medic dan paramedic veteriner 5. Masih banyak penyedia bahan pangan asal hewan/ternak yang belum memahami ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
3	Rendahnya Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak penyuluh yang belum menerapkan sistem penyuluhan secara maksimal dan berkelanjutan 2. Fungsi kelompok tani belum diterapkan secara benar dan terarah oleh pengurus dan anggota kelompok tani

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Pertanian RI

Dengan memperhatikan visi pemerintah dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah **“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Strategi utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi

7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Strategi Pendukung sebagai berikut:

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

Kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019 dibagi dua yaitu kebijakan umum dan kebijakan teknis :

1. Kebijakan Umum

- a. Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula
- b. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri
- c. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaaan dan ketahanan pangan
- d. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian
- e. Kebijakan fokus komoditas strategis
- f. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan
- g. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi

2. Kebijakan Teknis Operasional

- a. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman

- b. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian
- c. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian
- d. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan pertanian
- e. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

Telaahan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Berau.

Dalam kerangka sinergi tersebut, perlu ditelaah Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menyelaraskan dengan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beberapa isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan SKPD

Permasalahan Pelayanan

1. Keterbatasan anggaran pembangunan pertanian (APBD)
2. Koordinasi antar Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
4. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai
5. Perubahan lahan pertanian yang produktif ke peruntukan non pertanian

6. Terbatasnya lahan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura
7. Sosialisasi dan Penerapan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum dilaksanakan.
8. Pengembangan potensi pemanfaatan lahan kritis belum dilaksanakan.

Isu Strategis

I. Alih fungsi lahan

Sejalan dengan perkembangan penduduk Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka permintaan produk pertanian terutama pangan juga semakin meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan karena kapasitas sumberdaya lahan menjadi menurun. Berubahnya fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke peruntukan non pertanian tanaman pangan tidak diikuti dengan pembukaan lahan baru yang berimbang. Permasalahan lain yang dihadapi adalah degradasi lingkungan pembangunan daerah yang mengutamakan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam serta terjadinya kelangkaan pupuk, kekeringan, banjir serta anjloknya harga gabah pada musim panen, yang pada akhirnya berdampak pada penghasilan petani itu sendiri. Sebagai jalan keluar karena tidak ada keperdulian para pelaku ekonomi, terjadinya pergeseran struktur ketenagakerjaan dan penguasaan pemilikan lahan pertanian perdesaan serta adanya transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri dan demografis dari perdesaan ke perkotaan. Hal ini akan berakibat lahan pertanian yang ada menjadi tidak produktif dan sangat mudah teralih fungsikan. Sejak beberapa tahun terakhir terjadi alih fungsi sawah ke non pertanian sehingga mengurangi luasan pertanaman padi sawah. Sebagai contoh alih fungsi lahan di Kabupaten Kutai Kertanegara mencapai sebesar 2.145 ha (sumber Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara).

Potensi lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur cukup besar dan setiap tahun arealnya semakin luas karena tidak dilakukan reklamasi secara sempurna, terutama di bekas tambang batubara. Pada sebagian lahan kritis dapat dikembangkan pola pertanian campuran dimana Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah berpengalaman membuat demplot dan cukup berhasil. Dengan teknik ini, tekanan terhadap konversi lahan dapat dikurangi disamping dapat meningkatkan pendapatan petani. Pendanaan bisa diusulkan kepada Badan Pengelola REDD+ dan juga dengan perusahaan tambang terkait. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Dinas Kehutanan dan juga dengan lembaga-lembaga pendonor perlu ditingkatkan.

Dampak yang ditimbulkan dengan alih fungsi tersebut adalah :

- Terganggunya ketersediaan pangan, yang pada akhirnya mengancam produksi pangan nasional.
- Gagal panen akibat banjir.
- Tidak berfungsinya prasarana dan sarana infrastruktur yang mengakibatkan kerugian investasi yang ditanamkan.
- Dampak sosial pada rumah tangga pertanian adalah dengan hilangnya pekerjaan bagi buruh tani dan meningkatnya petani gurem, selain itu juga terjadi alih profesi.

Untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan yang ada akan maka perlu komitmen yang kuat dari semua stake holder untuk mencegah terjadinya konversi lahan dan memanfaatkan semua lahan yang ada baik yang produktif maupun yang tidak produktif (lahan marginal) sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan.

2. Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Timur

Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari hasil Sensus

Penduduk tahun 2000 dan hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 2.443.334 jiwa, meningkat menjadi 3.553.143 jiwa pada tahun 2010. Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Timur telah bertambah sekitar 100 ribu jiwa setiap tahunnya.

Jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2011 adalah 3.690.520 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,82 % per tahun selama periode tahun 2000 – 2010, lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk secara nasional sebesar 1,49 % per tahun. Tingginya angka pertumbuhan ini disebabkan migrasi maupun karena tingkat kelahiran yang memang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa konsekwensi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kebutuhan pangan.
- b. Perlu adanya upaya diversifikasi konsumsi pangan non beras.
- c. Terbentuknya pasar yang luas bagi produk-produk pertanian.

Data Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013

No	Kab./Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Paser	184.402	230.316	239.114	248.248	257.731
2	Kutai Barat	161.778	165.091	168.393	174.825	181.504
3	Kutai Kartanegara	538.529	626.680	650.619	675.473	701.276
4	Kutai Timur	196.738	255.637	260.750	270.710	281.052
5	Berau	176.422	179.079	182.589	189.564	196.805
6	Penajam Paser Utara	127.532	142.922	145.723	151.290	157.069
7	Balikpapan	516.522	557.579	590.309	612.859	636.270
8	Samarinda	609.380	727.500	770.204	799.626	830.172
9	Bontang	138.021	143.683	146.557	152.155	157.967
10	Mahakam Hulu	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TIMUR		2.649.324	3.028.487	3.154.258	3.274.750	3.399.846

3. Hasil Jual Produk Tanaman Pangan Belum Sepenuhnya Dinikmati Petani

Sampai saat ini, keuntungan terbesar dari mata rantai tata niaga produk tanaman pangan dinikmati oleh pedagang perantara, sementara petani produsen belum sepenuhnya menikmati hasil penjualan produknya. Harga komoditas pertanian bisa melambung dipasar, namun kesejahteraan petani tidak lantas ikut terangkat. Hal ini disebabkan petani terpisah dari mata rantai perdagangan komoditas pertanian. Ini disebabkan posisi tawar petani yang masih rendah karena kemampuan permodalan yang lemah sehingga seringkali terperangkap dalam sistem ijon. Mayoritas petani hanya menjual produknya ke tengkulak dan spekulan oleh tengkulak dan spekulan, kemudian oleh distributor, komoditas tersebut dimainkan sehingga harga kerap melambung di tingkat konsumen.

Berdasarkan hasil produksi komoditi padi, jagung dan kedelai maka dikaitkan dengan nilai tukar petani (NTP) merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa lain yang dibeli oleh petani. Secara konseptual nilai tukar petani adalah mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian. Di sini petani dalam kapasitas sebagai produsen dan konsumen.

Dalam kapasitas petani sebagai produsen, dapat dihitung nilai tukar petani (NTP) terhadap biaya produksi dan penambahan barang modal, sedangkan jika petani dalam kapasitas khusus sebagai konsumen dihitung NTP terhadap konsumsi rumah tangga petani, dan besaran indeks yang disebut NTP adalah hasil bagi antara indeks harga yang diterima (dari hasil produksi) dengan indeks harga yang dibayar petani untuk keperluan rumah tangga petani dan atau keperluan dalam

memproduksi barang-barang pertanian dengan indeks harga yang dibayar petani.

Dalam pengertian lain disebutkan NTP merupakan pengukuran kemampuan/daya tukar sektor pertanian terhadap sektor non pertanian. Fluktuasi NTP menunjukkan fluktuasi kemampuan riil petani dan mengindikasikan kesejahteraan petani. NTP diperoleh dari persentase rasio indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). Berdasarkan rasio tersebut, maka dapat dikatakan semakin tinggi NTP, semakin baik profit yang diterima atau semakin baik posisi pendapatan petani.

Jika disederhanakan NTP hanya menunjukkan perbedaan antara harga output pertanian dengan harga input pertanian, bukan harga barang-barang lain seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya.

Angka indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani kondisinya di Kalimantan Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif, namun ada kecenderungan menurun. Hal ini ditunjukkan dengan angka NTP yang sebesar 93,94 pada tahun 2013 yang lebih rendah dibanding dua tahun sebelumnya yang sebesar 97,14 dan 98,62. Kondisi ini disebabkan indeks yang diterima petani dari hasil penjualan hasil-hasil pertaniannya jauh lebih tertinggal dibanding laju indeks yang dibayar petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya sarana produksi pertaniannya. Hampir dari semua indeks kelompok mengalami penurunan, kecuali nilai tukar petani dari kelompok hortikultura. Kondisi ini harus menjadi perhatian pengambil kebijakan terutama menyangkut infrastruktur dan tatanianganya, termasuk teknologi/panca usahatani dan pendanaan usahanya yang masih sangat minim (Hasil Pendataan Usaha Tani 2009).

4. Dampak Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim dengan segala penyebabnya secara factual sudah terjadi di tingkat local, regional maupun global. Peningkatan emisi dan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) mengakibatkan terjadinya pemanasan global, diikuti dengan naiknya tinggi permukaan air laut. Naiknya tinggi permukaan air laut akan meningkatkan energi yang tersimpan dalam atmosfer, sehingga mendorong terjadinya perubahan iklim, antara lain *EL Nino* dan *La Nina*.

Perubahan iklim sudah berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan sector pembangunan di Indonesia. Sektor kesehatan manusia, infrastruktur, pesisir dan sector lain yang terkait dengan ketersediaan pangan (pertanian, kehutanan dan lainnya) telah mengalami dampak perubahan tersebut. Pada sector pertanian terutama pada pertanian tanaman pangan perubahan iklim akan berdampak pada :

- Kerusakan sumberdaya lahan pertanian.
- Peningkatan frekuensi, luas dan intensitas kekeringan/banjir.
- Intensitas gangguan organism pengganggu tanaman (OPT)
- Kegagalan panen dan tanam, penurunan indek pertanaman (IP), penurunan produktivitas, kualitas dan produksi.

Meningkatnya kerentanan di sector pertanian terutama disebabkan oleh berkurangnya kawasan hutan yang disebabkan deforestasi dan degradasi hutan seiring meningkatnya kegiatan pertambangan, meningkatnya luas lahan kritis dan rendahnya kemampuan untuk memulihkan kawasan yang telah rusak. Meningkatnya kerentanan tersebut yang bersamaan dengan variabilitas iklim yang semakin tidak menentu menyebabkan meningkatnya ancaman kegagalan panen baik karena banjir, kekeringan maupun karena serangan hama dan penyakit tanaman. Tingkat kerentanan yang tinggi justru dialami oleh petani-petani skala kecil. Usaha mitigasi melalui program REDD+, seperti penghijauan kembali kawasan atau areal lahan

kritis, harus direncanakan dan dilakukan secara bersamaan dengan program-program adaptasi perubahan iklim. Usaha-usaha adaptasi yang dapat dilakukan misalnya pengembangan bibit unggul yang tahan genangan atau yang tahan kekeringan, sekolah lapang iklim, memperbaiki kalender tanam (KATAM) dan sebagainya.

Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun adalah :

Strategi

1. Peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produksi padi dan ubi kayu.
2. Mempertahankan luas lahan fungsional yang ada terutama di lahan marginal.
3. Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
4. Pengembangan kawasan sentra padi dengan skala luasan ekonomis per kecamatan sesuai dengan Good Agriculture Practices (GAP).
5. Pengembangan kawasan sentra hortikultura dengan skala luasan ekonomis per kecamatan sesuai dengan GAP.
6. Pengembangan diversifikasi tanam.
7. Meningkatkan mutu produk, antara lain melalui penerapan GAP serta Good Handling Practices (GHP), penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, fasilitasi sarana panen dan pasca panen.
8. Promosi, edukasi dan fasilitasi dalam usaha peningkatan kemitraan dengan pemangku kepentingan terutama stakeholder yang terkait dengan program REDD+.
9. Mengembangkan berbagai teknik pertanian adaptif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan produksi padi dan ubi kayu dengan memanfaatkan lahan kritis.
2. Meningkatkan nilai tambah produk padi dan ubi kayu.
3. Perlindungan tanaman dari OPT dan dampak perubahan iklim dengan pola tanam yang dapat memutus siklus hama.
4. Meningkatkan penggunaan benih unggul yang tahan tergenang dan tahan terhadap kekeringan dalam mengatasi variabilitas iklim.
5. Koordinasi penerapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Khususnya memperkuat kelembagaan ditingkat petani dan pembiayaan yang bersumber dari berbagai pendanaan baik nasional maupun dana internasional.
6. Optimasi lahan dan jaringan irigasi
7. Menyediakan alat dan mesin pertanian yang rendah emisi dan ramah lingkungan.
8. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan penerapan teknologi adatif terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal.
9. Sosialisasi dan adopsi teknologi pertanian yang ramah lingkungan.
10. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan.
11. Pengembangan kawasan-kawasan serta produksi terpadu dengan konsolidasi usaha tani produktif.
12. Pemasarakatan produk tanaman pangan dan hortikultura melalui media cetak dan elektronik, pameran dan gerakan konsumsi buah local.
13. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku dan produk.
14. Menyediakan system informasi harga produk tanaman pangan dan hortikultura.
15. Mendorong minat investasi dan kemitrausahaan melalui promosi.

Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan Pelayanan

1. Produksi daging masih rendah
 - Kurangnya jumlah bibit ternak berkualitas, rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam budidaya peternakan
 - Belum terpenuhinya kebutuhan daging, telur, dan susu dari produk lokal Kaltim, sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging sapi masih didatangkan dari luar Kaltim sekitar 74,18%, telur 34,05% dan susu 100%
 - Masih adanya kejadian khusus penyakit Jembrana, AI, Parasiter/cacingan dan gangguan reproduksi pada sapi
2. Penerapan teknologi peternakan belum optimal
 - Pemahaman peternak terhadap pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas dan teknologi tepat guna lainnya masih rendah seperti teknologi pakan dan IB
3. Usaha pengolahan hasil peternakan belum optimal
 - Masih banyak penyedia bahan pangan asal hewan yang belum memahami ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Isu Strategis

1. Populasi Ternak khususnya sapi potong masih rendah disebabkan tingkat kelahiran yang relatif masih rendah dan tingginya pemotongan ternak betina yang masih produktif.
2. Pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi yang berasal dari protein hewani asal ternak.
3. Masih terjadinya kasus penyakit hewan menular Jembrana pada Sapi Bali dan tingginya gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau serta penyakit zoonosis AI
4. Pengembangan energi alternatif, terbarukan dan ramah lingkungan

5. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk Peternakan
6. Jaminan keamanan pangan produk peternakan.

Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah :

Strategi

1. Peningkatan produktivitas ternak
2. Peningkatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis
3. Pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang.
4. Peningkatan peran swasta dalam usaha pembibitan ternak khususnya sapi dan kambing.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Peternak dan Pelaku Usaha untuk menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing.

Arah Kebijakan

1. Penurunan resiko *inbreeding* melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA).
2. Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (*calving interval*) dan peningkatan bobot lahir serta bobot lahir.
3. Perbaikan mutu genetik sumber daya genetik ternak asli Kalimantan Timur (Rusa Sambar, Kerbau Kalimantan Timur dan Ayam Nunukan).
4. Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB).

5. Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB).
6. Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice).
7. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas melalui pengembangan desa mandiri energi.
8. Pemanfaatan pupuk organik yang ramah lingkungan.
9. Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskesmas dan Check Point).
10. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, depopulasi, biosecurity dan vaksinasi.
11. Akreditasi laboratorium terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.
12. Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman.
13. Pengembangan kawasan peternakan.
14. Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak.
15. Pengembangan komponen agribisnis peternakan.
16. Peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan sumber pembiayaan lainnya.
17. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha peternakan **direvisi menjadi** *"Peningkatan keterampilan peternak dan pelaku usaha peternakan"*.
18. Peningkatan prasarana dan sarana peternakan, baik sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal.
19. Perbaikan standarisasi produk peternakan dan sistem pendukung peternakan.

20. Peningkatan penerapan *Public Awareness* (kesejahteraan hewan) melalui sosialisasi kepada konsumen, peternak dan pelaku usaha.
21. Akreditasi laboratorium terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner.

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah salah satunya untuk Pengembangan Kawasan Pertanian.

Sebagai peringkat kedua dalam menyumbang struktur ekonomi di Kabupaten Berau, sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 2,96 %. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini, pemerintah memiliki strategi untuk mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; mengembangkan kawasan terpadu mandiri; meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar/swasta; serta mengembangkan produk unggulan lokal.

Luas wilayah Kabupaten Berau adalah 2.355.850 ha dan Luas wilayah Kabupaten Berau (tambahan perairan laut) adalah 3.412.700 ha. Rencana pola ruang daratan Kabupaten Berau terbagi menjadi dua yaitu Kawasan Lindung seluas 380.259,80 ha atau 16,14% dari total luasan daratan, dan Kawasan Budidaya seluas 1.975.590,05 atau 83,86% dari total luasan daratan. Pola ruang Kawasan lindung terdiri dari Hutan Lindung, Kawasan Konservasi Pesisir, Kawasan Lindung Geologi (karst), Mangrove, Sungai, Suaka Margalaut, dan Taman Wisata Alam Laut. Sedangkan Pola ruang Kawasan Budidaya terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Pertanian, Perkebunan, Kawasan Budidaya Laut,

Pemukiman Perkotaan, Pemukiman Perdesaan, Kawasan Industri, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata, dan Zona Pariwisata Kepulauan. Kawasan Pertanian yang tersedia seluas 64.083,28 ha atau 3,24% dari total kawasan budidaya (Hasil RTRW Kabupaten Berau Tahun 2011-2031).

Isu tenurial dan zonasi kawasan berdasarkan dokumen KLHS terkait dengan batas-batas pengelolaan yang belum jelas antara satu dengan yang lain.

1. Konflik perebutan sumber daya alam

Perebutan akses sumber daya sering menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan batas antar kampung belum seluruhnya ditetapkan dan dipertegas. Selain itu, pengelolaannya belum memperhatikan aspek lingkungan, social, dan budaya, dan arah pembangunan tidak konsiseten dengan peruntukan penggunaan lahan.

2. Belum seluruh kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan belum ditetapkan dan ditegaskan

Batas kawasan hutan dan aktifitas masyarakat belum disepakati karenaa kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan dan penegasan batas kawasan hutan, serta akses masyarakat di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui perhutanan sosial Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah terhadap Hak-hak adat yang belum diakui dan dilindungi.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis wilayah Kabupaten Berau, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, telaahan visi – misi – sasaran program sehingga dapat ditentukan isu – isu strategis sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan
2. Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
3. Hasil Jual Produk Tanaman Pangan belum Sepenuhnya Dinikmati Petani
4. Dampak Perubahan Iklim
5. Populasi Ternak khususnya sapi potong masih rendah disebabkan tingkat kelahiran yang relatif masih rendah dan tingginya pemotongan ternak betina yang masih produktif.
6. Pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi yang berasal dari protein hewani asal ternak.
7. Masih terjadinya kasus penyakit hewan menular Jembrana pada Sapi Bali dan tingginya gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau serta penyakit zoonosis AI
8. Pengembangan energi alternatif, terbarukan dan ramah lingkungan
9. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk Peternakan
10. Jaminan keamanan pangan produk peternakan.
11. Pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau (*Green Governance*)
12. Pengembangan agro industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
13. Penerapan SDG's (*Sustainable Development Goals*)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam kerangka mewujudkan visi dan misi RPJMD, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Renstra akan diimplementasikan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintah daerah untuk jangka menengah. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut **“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian”**. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan Produksi Pertanian, dengan indikator:
 - Jumlah Produksi Padi (ton)
 - Jumlah Produksi Jagung (ton)
2. Meningkatkan Produksi Peternakan, dengan indikator:
 - Jumlah Produksi Daging (ton)

3. Meningkatnya Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelompok Tani, dengan indikator:

- Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas (Kelompok Tani)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian	PDRB sektor pertanian	persen	5,74	6,04	6,34	6,49	6,52	6,55
	1. Meningkatkan Produksi Pertanian	Jumlah produksi padi	ton	31.000	32.100	35.398	38.938	42.832	47.715
		Jumlah produksi jagung	ton	15.460	36.380	57.300	78.300	100.300	110.300
	2. Meningkatkan Produksi Peternakan	Jumlah produksi daging	ton	2.585	2.700	2.750	2.800	3.000	3.200
	3. Meningkatkan Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	kelompok tani	10	15	22	25	25	25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau

Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Berdasarkan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan			
MISI II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme dan Manajemen pengadaan, penyaluran dan monitoring pengadaan benih dan pupuk diupayakan terus dilakukan penyempurnaan sehingga memenuhi prinsip 6 tepat Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usahatani seperti jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), jaringan irigasi tersier dan kuarter. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk menggunakan benih unggul bersertifikat dan penggunaan pupuk secara berimbang Pengawasan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih dan pupuk bersubsidi Penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi/wilayah Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau

VISI : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan

MISI II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan. • Penguatan peran Kelompok Tani dalam upaya pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) • Penguatan pengendali organisme pengganggu tanaman – pengamat hama dan penyakit (POPT-PHP) • Menata kembali kelembagaan pertanian tingkat daerah • Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan pengendalian hama terpadu melalui brigade proteksi tanaman • Penyediaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman • Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) • Optimalisasi Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian • Peningkatan peran kelembagaan usaha swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana produksi/produksi secara mandiri

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau

VISI : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan

MISI II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman • Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal • Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan • Meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kelompok dan gabungan kelompok tani • Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik 	

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau

<p>VISI : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan</p>			
<p>MISI II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>dari segi aspek manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar dan jaringan pasar produk pertanian mulai dari tingkat sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga • Fasilitasi kelembagaan pasar guna meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar bagi petani 	

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau

<p>VISI : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan</p>			
<p>MISI II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penerapan standar mutu sehingga produk pertanian yang dipasarkan sesuai standar mutu negara tujuan ekspor 	
	Meningkatnya Produksi Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Populasi Ternak • Peningkatan Angka Kelahiran • Peningkatan pengemasan, penyidikan, pencegahan dan atau pengendalian penyakit hewan menular strategis • Peningkatan jual dan kompetensi tenaga medic dan paramedic veteriner 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) • Peningkatan kualitas pakan ternak • Peningkatan manajemen budidaya peternakan • Kredit Ternak Sejahtera, Asuransi Usaha Ternak Sapi • Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskesmas dan Check Point)

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau

<p>VISI : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan</p>			
<p>MISI II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, vaksinasi, biosecurity dan depopulasi • Peningkatan pemenuhan produk pangan asal ternak yang ASUH melalui unit Rumah Potong Hewan (RPH) dan unit Rumah Potong Unggas (RPU)
	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi penyuluh dan petani mengikuti perkembangan teknologi • Mengkaji penerapan teknologi tepat guna ke daerah lain dan Pelaksanaan diklat/kursus bagi petugas/petani • Memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perilaku penyuluh dan petani • Penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi • Tertib administrasi di masing-masing tingkatan kelembagaan pertanian • Peningkatan eksistensi/kelas kelompok tani

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau

VISI : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan

MISI II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fungsi penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan petani • Pengembangan dan penguatan kapasitas penyuluh pertanian Polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian spesialis di tingkat Kabupaten • Pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) • Pelatihan bagi pengelola P4S dan pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya dilaksanakan oleh UPT pelatihan sedangkan pelatihan bagi petani pelaku 	

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau

VISI : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan

MISI II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>uatama agribisnis dilaksanakan oleh P4S</p> <ul style="list-style-type: none">• Membina petani maju sebagai patron dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru di tingkat lapangan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:



Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program yang akan dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
10. **Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan**
11. **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan**
12. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**
13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
15. **Program Peningkatan Produksi Peternakan**
16. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Peternakan
17. Program Pengendalian Hama Terpadu

Program diatas disusun berdasarkan tupoksi SKPD yang merupakan acuan bagi penyusunan program Kesekretariatan dan Bidang/UPTD lingkup Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau pada periode 6 (enam) tahun ke depan (2016 - 2021). Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun

2007, masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan.

Dalam mencapai sasaran pembangunan pertanian, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Daerah. Kegiatan yang tercakup dalam program - program tersebut, merupakan kegiatan operasional lingkup Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja setiap tahun dengan memperhatikan masalah, tantangan dan peluang serta isu - isu strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan serta pengembangannya.

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1	2
3.03.01	Dinas Pertanian dan Peternakan
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.0.013.3.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.0.013.3.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.0.013.3.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.0.013.3.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.0.013.3.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.0.013.3.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.0.013.3.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.0.013.3.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.0.013.3.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.0.013.3.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.0.013.3.03.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.0.013.3.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1	2
3.0.013.3.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
3.0.013.3.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
3.0.013.3.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
3.0.013.3.03.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03.3.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.03.3.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.03.3.03.01.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.03.3.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.03.3.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.03.3.03.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
3.03.3.03.01.05.04	Bimbingan Teknis Teknologi Pertanian
3.03.3.03.01.06	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.03.3.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.03.3.03.01.06.05	Sosialisasi Kinerja Program SKPD
3.03.3.03.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.03.3.03.01.06.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
3.03.3.03.01.06.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.03.3.03.01.06.11	Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1	2
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.03.3.03.01.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
3.03.3.03.01.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
3.03.3.03.01.15.06	Peningkatan Infrastruktur dan Daya Dukung Lahan Kering
3.03.3.03.01.15.07	Peningkatan Infrastruktur Pertanian
3.03.3.03.01.15.08	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
3.03.3.03.01.15.09	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Gunung Tabur)
3.03.3.03.01.15.10	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Sambaliung)
3.03.3.03.01.15.11	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Teluk Bayur)
3.03.3.03.01.15.12	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Segah)
3.03.3.03.01.15.13	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Kelay)
3.03.3.03.01.15.14	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Tabalar)
3.03.3.03.01.15.15	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Biatan)
3.03.3.03.01.15.16	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Talisayan)
3.03.3.03.01.15.17	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Batu Putih)
3.03.3.03.01.15.18	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Biduk-Biduk)
3.03.3.03.01.15.19	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kesejahteraan Petani (BPP Kecamatan Pulau Derawan)
3.03.3.03.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1	2
3.03.3.03.01.16.12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3.03.3.03.01.16.15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
3.03.3.03.01.16.20	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Padi Sawah
3.03.3.03.01.16.29	Peningkatan Produksi Produk Pertanian
3.03.3.03.01.16.31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.03.3.03.01.16.32	Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik Pertanian
3.03.3.03.01.16.33	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura
3.03.3.03.01.16.34	Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK)
3.03.3.03.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
3.03.3.03.01.17.07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
3.03.3.03.01.17.15	Peningkatan Sub Terminal Agribisnis
3.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
3.03.3.03.01.18.04	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
3.03.3.03.01.18.07	Monitoring Pupuk Bersubsidi
3.03.3.03.01.18.08	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian
3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3.03.3.03.01.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
3.03.3.03.01.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
3.03.3.03.01.19.07	Fasilitas Penyediaan Pupuk dan Pestisida
3.03.3.03.01.19.11	Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
3.03.3.03.01.19.17	Sertifikasi Lahan Pertanian
3.03.3.03.01.19.18	Pengembangan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1	2
3.03.3.03.01.19.19	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian
3.03.3.03.01.19.20	Pembinaan Usaha Pertanian
3.03.3.03.01.19.21	Pengembangan Penangkar dan Benih Hortikultura
3.03.3.03.01.19.22	Pengembangan Penangkar dan Benih Padi
3.03.3.03.01.19.23	Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik Pertanian
3.03.3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
3.03.3.03.01.20.04	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh
3.03.3.03.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
3.03.3.03.01.21.01	Pendataan Masalah Peternakan
3.03.3.03.01.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
3.03.3.03.01.21.06	Pelayanan Kesehatan Hewan
3.03.3.03.01.21.07	Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
3.03.3.03.01.21.07	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03.3.03.01.21.08	Pelayanan Pemotongan Ternak Ruminansia
3.03.3.03.01.21.09	Pelayanan Pemotongan Ternak Unggas
3.03.3.03.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.03.3.03.01.22.03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
3.03.3.03.01.22.08	Pengembangan Agribisnis Peternakan
3.03.3.03.01.22.10	Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Peternakan
3.03.3.03.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
3.03.3.03.01.23.01	Penelitian dan Pengembangan Hasil Produksi Peternakan
3.03.3.03.01.23.05	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan
1	2
3.03.3.03.01.23.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan
3.03.3.03.01.23.15	Pengawasan Kualitas Hasil Produksi Peternakan
3.03.3.03.01.23.17	Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU
3.03.3.03.01.24	Program Peningkatan Produksi Peternakan
3.03.3.03.01.24.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
3.03.3.03.01.24.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
3.03.3.03.01.24.07	Peningkatan Penerapan Teknologi Pakan Ternak
3.03.3.03.01.24.08	Peningkatan Mutu Genetika Bibit Ternak
3.03.3.03.01.24.09	Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Peternakan
3.03.3.03.01.24.10	Pembinaan Agribisnis Peternakan
3.03.3.03.01.24.11	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
3.03.3.03.01.24.12	Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.3.03.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Peternakan
3.03.3.03.01.26.01	Sinkronisasi Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.3.03.01.27	Program Pengendalian Hama Terpadu
3.03.3.03.01.27.03	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Penyajian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin diwujudkan oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Berau yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Pertanian dan Peternakan, sebagai berikut:



Tabel 22
Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah Produksi Padi	37.440	31.000	32.100	35.398	38.938	42.832	47.715
2.	Jumlah Produksi Jagung	4.555	15.460	36.380	57.300	78.300	100.300	110.300
3.	Jumlah Produksi Daging	2.556,9	2.585	2.700	2.750	2.800	3.000	3.200
4.	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	-	10	15	22	25	25	25

BAB VIII
PENUTUP

Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Diharapkan juga, Renstra ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

Rencana kerja strategis dan program pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang telah disusun dalam rangka memberikan arah dan langkah dalam rangka pencapaian sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan telah disusunnya dokumen Rencana Strategis tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standard dan penyusunan rencana kerja sehingga penjabaran rencana kerja setiap tahunnya akan lebih mudah dilaksanakan. Dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatannya, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Rencana kerja strategis dan program ini perlu diikuti dengan perencanaan kegiatan operasional yang memadai sesuai dengan kebutuhan lapangan, dan diikuti oleh pelaksanaan di lapangan secara selektif dan efisien. Implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan pada tingkatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan akibat adanya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian dan peternakan.

Pencapaian sasaran dan tujuan Renstra dan tujuan Renstra lima tahun ke depan disadari bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, namun demikian bukanlah pula satu kemustahilan. Dengan tekad kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas semua jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan dan dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, diyakini semua harapan dan cita-cita pembangunan pertanian dan peternakan Kabupaten Berau dapat tercapai.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan akan sangat tergantung dari partisipasi aktif para pelaku (*stakeholders*) di lapangan, baik petani ternak, kelembagaan, para pembina termasuk penyuluh, organisasi profesi dan masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Berau.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan/kesempurnaan Renstra kurun waktu 5 tahun kedepan dapat bermanfaat sesuai Perencanaan pembangunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yang telah ditetapkan.